

*Relationship Between Tranparancies Of Funding Objectives And Work Ethics Of  
The Local Government Apparatus In Minahasa*

Frida Magda Sumual  
Universitas Negeri Manado Fakultas Ekonomi  
frida.sumual@gmail.com

*Abstract*

*This research aims to discover the relationship between tranparancies of funding objectives and work ethics of the local government apparatus in Minahasa. The public sector development in Indonesia should be followed by research on work ethics concept in order to prepare good apparatus as public duties.*

*This research analyses data quantitatively using non parametric statistic test X2. To simplify the analysis cross tabulation is created so data on the table can be analised to test the hypotheses. This research collects qualitative and quantitive data. Field obsevation is used as data collection instrument.*

*The research finding shows that there is a significant relationship between tranparancies of funding objectives and work ethics of the local government apparatus 0,56 %. The funding objectives tranparancies determine the size of funding objectives specifcly and understood by whom responsible. Government apparatus will react positively and relatively strong to increase the funding objectives tranparancies. Superior leaders can increase job satisfACTION lower job strength and increase fuunding related to work ethics.*

*Keywords: Transparency Of Funding Objectives, Work Ethics.*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor publik di Indonesia sudah selayaknya diiringi dengan penelitian dan pengkajian tentang konsep-konsep kinerja dalam upaya menyiapkan aparat yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Kinerja aparat menjadi suatu yang sangat dibutuhkan pada sebuah lembaga sektor publik yang menerapkan *good governance*. Gencarnya tuntutan pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan nasional maupun keuangan daerah, dan kinerja aparat pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka

mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perludilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD`45. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPD.

Untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Penjangkaran aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam proses penganggaran daerah.

Pelaksanaan penelitian ini akan mengkaji apakahkinerja aparat pemerintah berhubungan kejelasan sasaran anggaran, dengan subjek penelitian adalah pejabat struktural pemerintah seperti kepala subbagian dan kepala bagian pada beberapa Kantor Dinas dan Badan di Kabupaten Minahasa. Adapun judul penelitian ini adalah sebagai berikut: “Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa”.

### **Konsep Akuntansi Sektor Publik**

Sektor publik sering dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal.

Sektor publik eksis karena dibutuhkan. Jadi keberadaan sektor publik di tengah masyarakat tidak bisa dihindarkan (*inevitable*). Masyarakat membutuhkan regulasi yang mengatur pemakaian barang-barang publik (*public goods*). Dalam perkembangannya, sektor publik sangat berperan dalam pengaturan *public goods* tersebut sehingga dapat didistribusikan kepada segenap masyarakat secara adil dan merata.

### **Pengertian Anggaran dan APBD**

Menurut Kenis (1979:70) menyatakan bahwa suatu anggaran bukan saja sebagai rencana keuangan yang menganggarkan besarnya biaya dan pendapatan pada pusat pertanggungjawaban, tetapi juga merupakan alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi, dan alat penumbuh motivasi. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang dapat diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Selanjutnya menurut *Government Accounting Standard Board* (GASB), dalam buku Bastian (2006:79), definisi anggaran (*budget*) adalah sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

### **Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Kenis (1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relative sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Manajemen tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan sasaran anggaran mereka. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik memiliki pengaruh yang positif terhadap komitmen dan pencapaian sasaran anggaran serta kepuasan karyawan.

### **Konsep Kinerja Sektor Publik**

Mashun (2006:25) menyatakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategik suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penjelasan singkat tentang beberapa indikator tersebut menurut Mashun (2006 : 77) adalah sebagai berikut:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti

anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material, dan masukan lainnya, yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (*benchmarking*) dengan lembaga-lembaga relevan.

2. Indikator proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*). Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan dengan keluaran. Instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan situasi kegiatan instansi. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah.
4. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangkamenengah yang mempunyai efek langsung. Pengukuran indikator langsung sering kali rancu dengan indikator keluaran. Indikator *outcome* lebih utama dari sekedar *output*. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan

baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

5. Indikator manfaat (*benefit*); adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative.

Sementara itu, menurut Palmer yang dikutip oleh Mahsun (2006:78), jenis indikator kinerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Indikator biaya (misalnya biaya total, biaya unit)
2. Indikator produktivitas (misalnya jumlah pekerjaan yang mampu dikerjakan pegawai dalam jangka waktu tertentu).
3. Tingkat penggunaan (misalnya sejauh mana layanan yang tersedia digunakan)
4. Target waktu (misalnya waktu rata-rata yang digunakan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan)
5. Volume pelayanan (misalnya perkiraan atas tingkat volume pekerjaan yang harus diselesaikan pegawai)
6. Kebutuhan pelanggan (jumlah volume pelayanan yang disediakan dibandingkan dengan volume permintaan yang potensial)

7. Indikator kualitas pelayanan
8. Indikator kepuasan pelanggan
9. Indikator pencapaian tujuan.

Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja diukur secara tidak langsung melalui indikasi-indikasi kinerja yang kemudian disusun dalam data kuantitatif.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau dalam bentuk kategori. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Sumber data penyusunan skripsi ini yaitu; (a) data primer, dan (b) data sekunder.

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari para responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan jurnal serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara pengumpulan data serta alat yang dipakai pada pengumpulan data adalah melalui kajian lapangan sebagai berikut:

- a. Konsultasi tentang maksud penelitian dengan pimpinan kantor Dinas/Badan,
- b. Penyebaran instrumen penelitian (angket),
- c. Penjelasan cara pengisian angket,
- d. Pengumpulan angket.

Angket tentang kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa disusun berdasarkan indikator atau bidang tugas yang menurut Mahoney (1963) terdiri dari perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi. Tiap bidang tugas ini diuraikan lebih spesifik dalam kuesioner penelitian. Jadi kuesioner ini terdiri dari delapan bidang tugas dengan uraiannya masing-masing, dilengkapi dengan

skala kinerja skor 1 s/d 9. Skor kinerja yang akan diisi responden dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu; kinerja di bawah rata-rata ( skor 1, 2, dan 3), kinerja rata-rata ( skor 4, 5, dan 6), serta kinerja di atas rata-rata ( skor 7, 8, dan 9). Bentuk kuesioner lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Kuesioner tentang kejelasan sasaran anggaran menggunakan skala Lickert yang disederhanakan (tiga pilihan) dengan skor a = 3, b = 2, dan c = 1, yaitu sebagai berikut: kejelasan sasaran anggaran, terdapat enam pernyataan/pertanyaan dengan pilihan; (a) sangat sering, (b) sering, (c) tidak pernah. Kuesioner penelitian ini akan didarkan kepada responden sesudah dikoreksi dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan alat uji statistika nonparametrik  $t^2$ . Untuk mempermudah analisis, terlebih dahulu dibuat tabulasi silang sehingga data yang tertera di dalam tabel dapat dianalisis untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan  $t^2$  atau kai kuadrat, yang menurut Sudjana (1992:280) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t^2 = \sum_i^n \sum_j^n \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Dimana :  $O_{ij}$  = frekwensi observasi dalam sel (i, j)  
 $E_{ij}$  = frekwensi harapan dalam sel (i, j)  
i = 1, 2, 3, .....b  
j = 1, 2, 3, .....k

Selanjutnya dengan anggapan bahwa tabel silang tersebut adalah tabel silang lengkap, maka :

$$E_{ij} = \frac{B_i K_j}{N}$$

Dimana :  $B_i$  = jumlah observasi dalam kategori ke i dari faktor pertama  
 $K_j$  = jumlah observasi dalam kategori ke j dari faktor kedua  
N = jumlah seluruh observasi

Statistik  $t^2$  tersebut mempunyai distribusi probabilitas dengan derajat kebebasan adalah (b-1) (k-1). Dengan demikian maka suatu hubungan dinyatakan signifikan apabila  $t^2$  yang diperoleh adalah sama atau

melebihi angka yang terdapat dalam distribusi probabilitas  $t^2$  untuk derajat kebebasan yang bersangkutan.

Freund (1979:329) mengatakan bahwa *“If the analysis of a contingency table shows that there is a relationship between the two variabels under consideration, the strength of the relationship can be measured by the contingency coefficient”*.

Begitu juga Sudjana (1992:282) mengatakan bahwa untuk mengetahui kekuatan atau derajat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, digunakan koefisien kontingensi C, dengan rumus sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{X^2 + N}}$$

Agar supaya harga C yang diperoleh dapat dipakai menilai derajat asosiasi antara faktor, maka harga C ini perlu dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum yang bisa terjadi (Sujana, 1992:282). Harga C maksimum ini dihitung dengan rumus :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Dimana : m = harga maksimum antara banyaknya baris dan banyaknya kolom. Makin dekat harga C kepada  $C_{maks}$  makin besar derajat kaitan antara variabel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Data Kinerja Aparat Pemerintah

Tabel 4.1 Data Kinerja Aparat Pemerintah

No. Responden	Skor	No. Responden	Skor
1	8	26	6
2	6	27	8
3	8	28	7
4	7	29	3
5	7	30	8
6	5	31	3
7	8	32	6
8	3	33	8
9	7	34	8

10	7	35	3
11	7	36	5
12	3	37	7
13	3	38	7
14	8	39	3
15	8	40	5
16	5	41	7
17	6	42	7
18	7	43	6
19	7	44	7
20	3	45	7
21	7	46	4
22	3	47	8
23	7	48	8
24	8	49	2
25	7	50	4

tiga kategori yaitu : kinerja di bawah rata-rata, kinerja rata-rata, dan kinerja di atas rata-rata. Untuk jelasnya kategori kinerja aparat pemerintah tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Kategori Data Kinerja Aparat Pemerintah

Kategori	Banyaknya	Persentase %
Kinerja di bawah rata-rata	10	20,00
Kinerja rata-rata	11	22,00
Kinerja di atas rata-rata	29	58,00
Jumlah	50	100,00

**Data Kejelasan Sasaran Anggaran**

Data kejelasan sasaran anggaran dikategorikan dalam tiga tingkatan yaitu : tidak memuaskan, memuaskan, dan sangat memuaskan. Untuk jelasnya data ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Kategori Data Kejelasan Sasaran Anggaran

Kategori	Banyaknya	Persentase %
Tidak memuaskan	12	24,00
Memuaskan	10	20,00
Sangat memuaskan	28	56,00
Jumlah	50	100,00

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan koefisien kontingensi C. Setelah harga C didapat, dilanjutkan dengan menguji signifikan koefisien kontingensi kemudian membandingkan harga C dengan C maksimum yang bisa terjadi.

**Kriteria Penilaian:**

**Tolak Ho jika ;  $t^2_{hitung} > t^2_{(v), \alpha} = 0,05$**

**Hipotesis :** Tidak terdapat hubungan yang berarti antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa

Perhitungan harga  $t^2$  untuk menguji hipotesis, digunakan tabel kerja hipotesis.

Tabel 4.4 Tabel Kerja Hipotesis

		KEJELASAN SASARAN ANGGARAN			
		Tidak pernah	Sering	Sangat sering	Jumlah
KINERJA APARAT PEMERINTAH	Kinerja di bawah rata-rata	4 2,4	3 2,0	3 5,6	10
	Kinerja rata-rata	5 2,64	3 2,2	3 6,16	11
	Kinerja di atas rata-rata	3 6,96	4 5,8	22 16,24	29
	Jumlah	12	10	28	50

$$\begin{aligned}
 t^2 &= \frac{(4-2,4)^2}{2,4} + \frac{(3-2,0)^2}{2,0} + \frac{(3-5,6)^2}{5,6} + \frac{(5-2,64)^2}{2,64} + \frac{(3-2,2)^2}{2,2} + \frac{(3-6,16)^2}{6,16} + \\
 &\quad \frac{(3-6,96)^2}{6,96} + \frac{(4-5,8)^2}{5,8} + \frac{(22-16,24)^2}{16,24} \\
 &= 1,07 + 0,5 + 1,2 + 2,10 + 2,29 + 1,62 + 2,25 + 0,56 + 2,04 \\
 &= 13,63
 \end{aligned}$$

Dari harga  $t^2$  ini diperoleh harga koefisien untuk kontingensi C yaitu:

$$C = \sqrt{\frac{13,63}{13,63+50}} = 0,46$$

Dengan  $\alpha = 0.05$  dan  $dk = (3-1) (3-1) = 4$ , didapat  $t^2_{0,95(4)} = 9,49$ , jelas lebih kecil dari 13,63 ; dengan demikian  $H_0$  dapat ditolak. Jadi penelitian ini memberikan pengujian yang berarti, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang nyata antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa.

Koefisien kontingensi maksimum adalah seperti berikut :

$$C_{\max} = \sqrt{\frac{3-1}{3}} = 0,816$$

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh derajat hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa adalah sebesar 0,56. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang berarti antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar 0,56.

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Aparat pemerintah akan memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Pemimpin tingkat atas dapat meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan kinerja anggaran.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat Terdapat hubungan yang berarti antara kejelasan sasaran dengan kinerja aparat pemerintah Kabupaten Minahasa, derajat hubungan = 0,56. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab. Aparat pemerintah akan memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.

## Saran

Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah keterbatasan dilihat dari obyek penelitian yang cukup besar, namun begitu menurut peneliti masalah mengenai kejelasan sasaran anggaran menarik untuk diteliti dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Minahasa. Untuk itu penelitian ini sebaiknya dilanjutkan oleh peneliti lain termasuk para dosen studi lanjut dengan menambah variabel dan sampel yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aimee F., dan Carol E., 2004, *Aligning Priorities In Local Budgeting Processes*.
- Bastian I., 2006, *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daniel W., (1989), *Statistik Non Parametrik Terapan*. Tarsito, Bandung.
- Darma, Emile Setia, 2004, SNA VII Denpasar, Bali.
- Dhammika D., 2001, *Legislative Bargaining and Incremental Budgeting*. Economics Program Research School of Social Sciences. Australia National University Canberra.
- Freund J E, 1979, *Modern Elementary Statistics*, Prentice-Hall Englewood Cliffs, N.J, U.S.A.
- Kenis I., 1979, *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review LIV.2.
- Mahoney., T.A, Jerdee., and Carroll, 1963. *The Jobs of Management*. Copyright. Pp 97-110.
- Mahsun M. 2006, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama, BPFE- Yogyakarta.
- Mahsun M, Sulistiyowati, dan Purwanugraha, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI Yogyakarta.
- Maryanti H A., 2002, *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis S2 Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Milani, Ken, 1975. The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. The Accounting Review, pp. 274 – 284.